

KAJIAN SOSIOLOGI ISLAM TERHADAP PATRIARKI DAN BIAS GENDER DI MADURA

Tania Putri Anhary
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
anharyputri@gmail.com

Received: 15-02-2023

Revised: 10-03-2023

Accepted: 31-03-2023

Abstract

This study is a sociological study that functions to find out and analyze how high rates of patriarchy and gender bias, especially women in Madura Regency, in this case studies and observations will be carried out regarding the level of education, especially education at Islamic boarding schools where most Madurese people receive Islamic boarding school education. This study also analyzes the level of interaction between genders so that it leads to the marriage life of the Madurese community. The focus of the study is on the analysis of patriarchy and gender bias in Madura, using the perspective of Antonio Gramsci's cultural hegemony theory as a problem analysis tool. The writing method uses the library method with descriptive data exposure. With primary and secondary data sourced from many books, journals, and previous research results, this is the main data that will be used in writing this article. So this research will focus on in-depth analysis based on sociology of gender theory.

Keywords: *Sociological, Patriarchy, Genders.*

Abstrak

Kajian ini merupakan kajian Sosiologi yang berfungsi untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana tingginya angka patriarki dan bias gender terutama perempuan di Madura yang dalam hal ini akan dilakukan kajian dan observasi mengenai tingkat pendidikan, terutama pendidikan di Pondok Pesantren yang mana sebagian besar masyarakat Madura mengenyam pendidikan pondok pesantren. Kajian ini juga menganalisis tingkat pergaulan antar gender hingga mengarah pada kehidupan pernikahan masyarakat madura. Adapun fokus kajian pada analisis patriarki dan bias gender di Madura, dengan menggunakan perspektif teori hegemoni kultural Antonio Gramsci sebagai alat analisis masalah. Adapun metode penulisan ini menggunakan metode kepustakaan dengan paparan data secara deskriptif. Dengan data primer dan sekunder yang bersumber dari banyak buku, jurnal, dan hasil penelitian sebelumnya, hal ini merupakan data utama yang akan digunakan dalam penulisan artikel ini. Maka penelitian ini akan fokus pada analisa mendalam berdasarkan teori sosiologi gender.

Kata Kunci: *Sosiologi, Patriarki, Gender.*

PENDAHULUAN

Masyarakat Madura memandang bahwa adanya perbedaan dalam hal jati diri antara laki-laki dan perempuan yang dalam hal ini mendapat perlakuan dan perbedaan pada cara bersikap, cara melindungi, cara memelihara dan cara bersikap lainnya. Masyarakat adat Madura sendiri masih sangat menjunjung tinggi religiusitas dan menempatkannya dalam kewajiban serta tanggung jawab tradisi yang etnis, hingga dilakukan secara turun temurun oleh berbagai pihak khususnya dalam masyarakat adat Madura. Sebagai contoh menempatkan perempuan dalam wadah terpisah dengan laki – laki yang menganut tradisi berdasarkan campuran keagamaan dan kepercayaan turun temurun dalam masyarakat. Selain itu, berkembang pesatnya perekonomian dan teknologi terutama dalam MEA¹ atau Masyarakat Ekonomi ASEAN, dapat membuka kesempatan perempuan Madura untuk melakukan keterkaitan dengan berbagai bidang dan sektor, seperti sektor pemerintahan. Dalam sektor pemerintahan daerah, perempuan memiliki kesempatan untuk 30% wajib diisi oleh perempuan, hal ini tentunya membuka peluang perempuan di seluruh negeri terutama perempuan Madura untuk ikut serta menjadi pendorong perekonomian dan *stakeholder* yang mampu berkontribusi banyak bagi masyarakat.

Wiyata menyatakan dalam penelitiannya bahwa masyarakat Madura memandang bahwa adanya perbedaan dalam hal jati diri antara laki-laki dan perempuan, dalam hal ini mendapat perlakuan dan perbedaan pada cara bersikap, melindungi, dan memelihara. Bagi mereka, perempuan menempati posisi yang berbeda terutama dalam segi pendidikan, karena perempuan di pulau Madura banyak yang mayoritas berada dalam lingkungan pondok pesantren. Saat perempuan masuk dalam usia pendidikan formal, maka mereka akan dimasukkan dalam pondok pesantren untuk menerima ajaran yang berbasis keagamaan. Hal ini Sebagian besar dilakukan, karena lembaga pendidikan yang terkuat menurut hasil penelitian di masyarakat Madura adalah Pondok Pesantren.²

Dalam perkembangan zaman dan budaya, anak perempuan mendapat perhatian dan posesifitas lebih tinggi daripada anak laki-laki, mulai dari larangan jam malam, bahkan dalam hal bermain dengan teman, banyak larangan bagi anak gadis untuk bepergian sendirian. Anak perempuan selalu mendapat perhatian dan pengawasan yang lebih ketat, bahkan saat perempuan dewasa bekerja, mereka masih tetap mendapat pengawasan yang ketat dari keduaorang tua maupun keluarga. Menilik pada sejarah, masyarakat Madura biasa memulai kerja dari umur belia, yaitu pada usia muda atau pada umur belasan tahun saat mereka baru lulus Sekolah Menengah Pertama. Dalam hal bekerja, memang semangat dan etos kerja orang Madura sangat tinggi, karena sesuai dengan keyakinan yang dianut, bahwa bekerja merupakan ibadah.

Pendidikan dan kewajiban bekerja pada perempuan mulai dikesampingkan dalam masyarakat Madura, karena adanya stereotip yang menyatakan bahwa perempuan akan bekerja dalam rumah tangga. Mereka memiliki keyakinan bahwa perempuan akan bekerja di dapur apabila telah bersuami. Pendapat inilah yang tertanam kuat, sehingga banyak dari masyarakat Madura, utamanya perempuan yang mengesampingkan pendidikan, dan fokus pada kewajiban dalam rumah tangga, yakni melayani suami dan anaknya. Hal ini berakibat pada minim dan terbatasnya akses perempuan untuk mengejar pendidikan tinggi, dan hanya anak laki-laki yang

¹ Koesno, Moh. 1975. *Kedudukan Wanita Menurut Adat Beberapa Masyarakat Pedesaan Madura*. Surabaya: BKKBN.

² Hidayati, Tatik. 2009. *Perempuan Madura Antara Tradisi dan Industrialisasi*. Karsa Vol XVI No. 2 Oktober 2009

nantinya diharapkan menjadi penerus dalam membenahi perekonomian keluarga. Meskipun perempuan dapat saja bekerja membantu perekonomian keluarga, namun sangatlah minim mengingat banyaknya pekerjaan rumah tangga yang harus dilakukan oleh perempuan.

Maka dalam hal ini kajian kesetaraan gender wajib untuk dibahas sebagai cara meningkatkan kesadaran dan pemahaman perempuan Madura akan kebebasannya dalam berpendapat dan belajar. Serta menolak dan mengubah hal-hal salah yang telah lama terjadi dan dianggap suatu kebiasaan diantara masyarakat. Salah satu tradisi perempuan Madura yakni keluarga memberikan perhatian khusus pada tubuh sosial. Tubuh sosial merupakan seperangkat identitas yang terproduksi akibat keterlemparan eksistensi melalui penghasilan regulasi berdasarkan ruang dan waktu.³ Ruang memang menjadi objek yang tidak bernyawa. Tetapi, sebenarnya ruang menjadi objek yang menghasilkan pendisiplinan tubuh melalui agen. Agen yang berada dalam ruang sering mengontrol kesadaran di bawah naungan kekuasaan dan institusi.⁴ Teraktualisasikan dari riset Putri dkk, menunjukkan jika perempuan di Sumenep, terutama daerah Prenduan sering melakukan perawatan tubuh melalui sosialisasi keluarga di rumah sejak kecil.⁵ Setiap perempuan di Prenduan memiliki tujuan yang berbeda dalam melakukan perawatan tubuh tradisional. Bagi perempuan yang sudah menikah, bertujuan untuk “memuaskan” suaminya di rumah. Sedangkan, perempuan berusia remaja bertujuan untuk merawat organ reproduksinya agar berfungsi dengan baik saat menikah. Berdasarkan temuan tersebut mengindikasikan bahwa keluarga masih menjadi institusi sosial yang terus melestarikan dominasi maskulin.

Pengulangan dominasi maskulin terjadi melalui ketidaksadaran kultural melalui pendidikan dari keluarga di rumah, hingga menghasilkan pengetahuan yang terobjektifikasi dan disalurkan kembali pada anaknya kembali nantinya.⁶ Penyaluran pengetahuan yang terobjektifikasi pada anak terjadi melalui relasi superordinari dan subordinasi, mengingat seorang anak belum memiliki kemampuan kognitif dan kuatnya modal simbolik orang tua.⁷ Konstelasi tersebut terlihat di Madura saat orang tua enggan mendengarkan suara moral dari anaknya, karena menganggap dirinya lebih memahami kehidupan berdasarkan pengalaman hidup.

Matinya eksistensi perempuan Madura terhadap tubuhnya sendiri belum menjadi siluet yang menggetirkan. Tontonan yang mengerikan terjadi saat agama menjadi propaganda yang membunuh kesadaran perempuan Madura. Setidaknya terdapat dua karakter agama di Madura. *Pertama*, agama progresif yang bermanfaat untuk menghasilkan kebaikan hidup bagi masyarakat. Sebagaimana di masa Orde Baru, para Kiai melakukan perlawanan terhadap rezim politik yang ingin membangun waduk Nipah di Sampang. Perlawanan terjadi akibat menyengsarakan masyarakat. *Kedua*, agama politik yang terbentuk melalui organisasi masyarakat dan politisasi

³ Raditya, D., dkk. (2014). Pengaruh Modal Investasi Minimal di BNI Sekuritas, Return, dan Persepsi Terhadap Risiko Pada Minat Investasi Mahasiswa, Dengan Penghasilan Sebagai Variabel Moderasi. E-Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana. Volume 3. No 7.

⁴ Bartky, S. L. (1990) *Femininity and Domination*. New York: Routledge.64

⁵ Putri, R. A., Artaria, M. D., & Graham-Davies, S. (2018). Traditional body care of women in Madura Island. *Masyarakat, Kebudayaan Dan Politik*, 31(3), 339–349.

⁶ Bourdieu Pierre. 2010. Dominasi Maskulin. Yogyakarta : Jalasutra, 110-112

⁷ Clark, D. P. (2010). *Molecular Biology*. New York: Academic Cell.

pengetahuan berkedok kemuliaan Tuhan.⁸ Agama politik juga menghasilkan pembungkaman terhadap perempuan Madura. Sebagaimana tingginya poligami di Madura terjadi melalui hegemoni atas dasar politik keagamaan.⁹ Begitu juga dengan pelaksanaan sunat perempuan di Madura juga terjadi melalui representasi keagamaan.¹⁰ Tindakan sosial ibu menyunat anak perempuannya saat bayi agar saat besar tidak memiliki nafsu seksual yang tinggi. Tentu saja, ini telah menentang kuadrat pemberian Tuhan. Tidak jauh berbeda dengan pelaksanaan pernikahan dini di Madura yang dilakukan atas dalil keagamaan.¹¹ Terjadinya pernikahan dini di Madura sering mendiskreditkan perempuan, bahwa perempuan yang sudah mengalami menstruasi harus segera menikah agar tidak terjerumus dalam perbuatan maksiat. Oleh karenanya, perempuan harus menerima pasangan yang dijodohkan oleh orang tuanya, sekalipun sang perempuan tidak menyukainya.

METODE PENELITIAN

Metode dalam kajian ini dilakukan secara sosiologi hukum terkait sejauh mana peran patriarki dan bias gender memengaruhi aspek-aspek sosial perempuan di Madura. Melalui pendekatan fenomenologi Alfred Schutz yang berfungsi untuk melaksanakan identifikasi dan fokus masalah pada aspek inderawi. Identifikasi makna dan melakukan pemaknaan terhadap individu-individu secara dialektika, sehingga kajian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan fenomenologi Schutz. Adapun tujuan dalam kajian ini adalah ingin menelusuri bagaimana kesetaraan gender perempuan dalam era zaman ini? Utamanya kesetaraan gender dalam aspek pendidikan. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan fenomenologi, yakni pendekatan dan analisis fenomena yang terjadi dalam masyarakat yang selanjutnya akan dilakukan penalaran dalam atasnya. Dengan itu fenomena yang terjadi adalah krisis kesetaraan gender di lembaga pendidikan khususnya dalam lingkup pondok pesantren di Madura. Adapun data primer yang ditelaah dalam penelitian ini adalah perempuan Madura yang sudah maupun belum menikah. Sedangkan data sekunder adalah buku, jurnal, penelitian terdahulu, yang nantinya akan dicari kajian terhadap literatur dan sumber terkait yang sesuai dengan topik yang dibahas oleh penulis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perempuan Madura masih berada dalam posisi yang ambivalen. Trilogi budaya Madura yang terdiri dari *bhuppa'*-*bhabbu'*, *guru*, *rato*, menjadi gambaran perempuan Madura (ibu) memiliki peran yang signifikan terhadap realitas kehidupan orang Madura. Secara antropologis, posisi ibu bagi orang Madura memiliki keberartian sebagai simbol religiusitas dan afeksi.¹² Begitu juga dengan perspektif sosiologis yang mempersepsikan ibu sebagai struktur makna harapan untuk menyongsong kehidupan. Harapan untuk menjalani kehidupan membutuhkan karakter

⁸ Raditya, A. (2020). Karakter Orang Madura, Nasionalisme, Dan Globalisasi.

⁹ Muzzammil, S., Affan, M., HS, M. A., & Masturiyah, M. (2021). Motif, Konstruksi, dan Keadilan Semu dalam Praktik Poligami Kiai Pesantren di Madura. *Jurnal SMART (Studi Masyarakat, Religi, Dan Tradisi)*, 7(01), 129–142.

¹⁰ Ibid, 122

¹¹ Mahfudin, A., & Waqi'ah, K. (2016). Pernikahan Dini dan Pengaruhnya terhadap Keluarga di Kabupaten Sumenep Jawa Timur. *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 1(April), 33–49.

¹² Mu'in, A., & Hefni, M. (2016). Tradisi Ngabulâ di Madura (Sebuah Upaya Membentuk Keluarga Sakinah bagi Pasangan Muda). *KARSA: Journal of Social and Islamic Culture*, 24(1), 109-125.

pengharapan yang anti destruktif. Oleh karenanya, studi etnografi arsitek hadir menjelaskan terjadinya penghormatan yang luhur terhadap ibu di Madura terdapat pola pemukiman *taneyan lanjhang* yang menempatkan perempuan sebagai individu yang aktif mengatur, membentuk, dan merawat kehidupan keluarga. Kajian sejarah ikut membangun konstruksi kemapanan perempuan Madura, bahwa para raja selalu memberikan pelayanan terbaik bagi istrinya di kehidupan. Bahkan, setelah wafat juga memuliakannya dengan membangun makam yang megah.

Dalam hal ini kajian patriarki dan bias gender tidak bisa dipisahkan dari kajian feminisme yang dalam hal ini Weir berpendapat (1996) feminisme berpijak pada postulat bahwa perempuan sebagai bagian identitas manusia yang memiliki kedudukan dan kesamaan hak. Sebab, posisi perempuan telah mengalami kematian sejak dirinya dilahirkan di dunia. Manusia terlahir sebagai esensi yang terberikan, sehingga menjadi objek yang terberikan. Rezim kedokteran sukses membuat individu yang terlahir menjadi permainan esensi berdasarkan konstruksi budaya. Jiwa dan tubuh 6 bayi perempuan terkonsepsikan inferioritas daripada bayi laki-laki.¹³ Konstelasi itu membuat gerakan feminis melakukan kritik terhadap supremasi laki - laki yang sudah menumbuh menjadi ideologi di masyarakat, hingga mampu menenyapkan eksistensi dan peran perempuan di kehidupan sosial.¹⁴ Terlepasnya eksistensi perempuan merupakan hasil dari sebuah pemenuhan kebebasan. Sartre dan Camus memperlihatkan bahwa kehidupan manusia merupakan pilihan untuk kemenjadian. Proses kemenjadian berangkat dari kebebasan untuk memilih dalam membentuk moralitas sesuai kehendak yang diinginkan. Berangkat dari konsep eksistensialisme, propaganda bahwa perempuan hanya menjadi objek bagi yang lain. Oleh karenanya, perempuan telah menjadi liyan yang kebebasannya direnggut paksa melalui etika ambiguitas yang memihak pada kenyamanan laki-laki. Secara komprehensif, terjadi pengembangan kesadaran perihail dilematika gender. Memasuki era postmodern, persoalan gender bukan lagi mengarah pada usaha pencapaian kesetaraan yang seragam. Konsepsi bahwa terjadi kesalahan dalam pencapaian kesetaraan. Selama ini, gerakan feminis sering mengedepankan kesetaraan bahwa perempuan dapat bekerja di kantor dan tidak mengurus urusan rumah tangga secara utuh. Lantas, bagaimana jika perempuan atas kesadarannya memilih keputusan untuk tidak bekerja, lantaran lebih memilih memikirkan kondisi keluarganya?

Ihwal tersebut mendorong Gayatri Spivak untuk menggaungkan konsep feminisme interaksionis yang mengkritik aliran-aliran feminisme yang condong berfokus pada permasalahan perempuan Barat. Feminisme interaksionis sebagai hasil kombinasi feminisme dan postkolonial yang berupaya menjabarkan pengalaman perempuan dunia Ketiga secara kontekstual. Sasaran dari feminis postkolonial adalah subjek perempuan di dunia Ketiga yang pernah mengalami penjajahan, baik itu oleh dunia Barat maupun oleh sesama saudaranya karena menjadi bagian dari pemerintah kolonialis.¹⁵ Pemaparan perempuan dunia Ketiga sebagai subaltern, karena memiliki posisi yang berbeda. Tidak hanya itu, subaltern juga dipahami sebagai yang "lebih rendah" atau "terbelakang". Suara perempuan dunia Ketiga sering terbungkam, sehingga mereka lebih memilih melarikan diri, agar terhindar dari keterasingan yang meniadakan

¹³ Astuti, Tri Marhaeni P. (2011). *Konstruksi Gender dalam Realitas Sosial*. Semarang: Unnes Press.

¹⁴ Ibid, 35

¹⁵ Gairola, R. (2017). Burning with shame: desire and south asian patriarchy, from gayatri spivak's "can the subaltern speak?" to deepa mehta's fire. *Comparative Literature*, 54(4), 307-324

identitasnya. Pelarian diri mereka hanya ingin mengejar realitas yang ada “di sini”, bukan realitas yang ada “di sana”. Realitas “di sana” hanya membuat diri mereka tidak pernah diakui karena selalu mengalami penormalisasian wacana .

Analisis patriarki dimulai dari peran pendidikan yang terjadi di Madura, dalam hal ini telah dilakukan studi bahwa perempuan di Madura banyak yang tingkat pendidikannya rendah, berbeda dengan laki-laki yang biasanya lebih memungkinkan untuk meraih tingkat pendidikan yang lebih tinggi. Dalam lingkup pendidikan yang paling banyak dienyam masyarakat Madura adalah Pendidikan di Pondok Pesantren. Mayoritas mereka lebih mempercayakan pendidikan putra dan putrinya pada pesantren, karena masyarakat Madura sangat kental memegang prinsip ajaran agama Islam.¹⁶ Adapun lingkungan pondok pesantren merupakan salah satu tempat yang melanggengkan budaya patriarki ini. Di dunia pesantren, gender adalah salah satu hal terkrusial. Dikatakan begitu karena sejauh ini persoalan gender kerap kali dibenturkan dengan kultur sosial pendidikan pesantren yang dalam banyak kesempatan dianggap sebagai sumber tertanamnya nilai-nilai ketimpangan gender yang banyak berkembang dalam tataran kehidupan sosial masyarakat. Sehingga, wajar kemudian jika pesantren dijuluki sebagai kerajaan kecil, dimana di dalamnya terdapat hierarki sosial sebagai representasi ketidaksetaraan gender.¹⁷

Sejauh ini, dialog antara isu sosial gender dengan paradigma sosial pendidikan pesantren masih jauh dari harapan. Usaha mempertemukan paradigma pendidikan pesantren dengan isu-isu sosial gender dalam satu konstruksi pemahaman yang dialogis-produktif masih belum menemukan titik temu. Demikian dikarenakan masih terbelenggunya wacana gender dalam sebuah mainstream yang dianggap buruk, tidak sejalan dengan semangat ajaran agama. Kondisinya pun semakin sulit di saat isu mengenai gender direduksi pada rumusan dan interpretasi hukum-hukum tradisional (kitab *gundbul*) yang diproduksi oleh para penafsir terdahulu. Dalam hal ini mengalami semacam pergeseran lantaran dipengaruhi oleh konteks sosial budaya, subjektivitas, kepentingan ekonomi, dan unsur-unsur politik pihak tertentu. Khususnya yang tertuang dalam tulisan-tulisan Fiqh klasik atau kitab *ghundul*, problem inilah yang sejatinya menjadi bangunan kuat atas mengakarnya persoalan gender di komunitas pesantren. Sialnya lagi, kajian terhadap teks-teks klasik ternyata banyak diamini, bahkan dipertahankan oleh kebanyakan pesantren masa kini.

Kentalnya sosial pendidikan pesantren dengan nilai-nilai ajaran yang bias gender sejatinya terbentuk oleh kultur sosial pesantren yang masih belum bisa melepaskan diri mereka dari kekuatan kultur hierarkis. Sebuah kecenderungan menempatkan sesuatu yang bukan saja diletakkan secara dikotomis, namun juga diletakkan secara berjenjang dalam bentuk stratifikasi sosial yang kuat. Akhirnya, jadilah kemudian pesantren sebagai sebuah lembaga pendidikan sosial keagamaan yang menanamkan pendirian ekstrim. Menutup diri dari perkembangan dan perubahan sosial, serta ikut andil mengabadikan system hierarki yang menempatkan peran dan status sosial secara berjenjang. Dengan begitu, terdapat dua pokok besar yang menyebabkan sosial pendidikan pesantren terjebak dalam orientasi bias gender yakni mengakarnya ideology patriarki, serta masih terjebaknya sosial pendidikan pesantren dalam kajian-kajian klasik yang berorientasi dikotomis, misogynis, diskriminatif. Dua pokok persoalan sosial pendidikan

¹⁶ Nurmila, N. (2015). Pengaruh Budaya Patriarki Terhadap Pemahaman Agama dan Pembentukan Budaya. *KARSA*, 23(105), 1–16.

¹⁷ Hidayati, Tatik. 2009. *Perempuan Madura Antara Tradisi dan Industrialisasi*. *Karsa* Vol XVI No. 2 Oktober 2009

pesantren di atas mengkrucut pada dua persoalan mendasar bahwa; *pertama*, pesantren adalah lembaga sosial yang diciptakan, dijalankan, dan dikembangkan oleh laki-laki (Kiai). *Kedua*, kaum perempuan dalam sistem sosial pendidikan pesantren dianggap sebagai kelompok subordinatif yang memiliki peran status sosial di bawah laki-laki (Kiai). Hal ini terjadi akibat dibentuknya oleh kontruksi masyarakat.

KAJIAN SOSIOLOGI ISLAM TERHADAP PATRIARKI DAN BIAS GENDER DI MADURA

Dominannya sosok kiai dalam tradisi sosial budaya pesantren merupakan representasi nyata atas menguatnya patriarki pesantren. Mengenai patriarki pesantren, Martin Van Bruineessen dalam studinya menemukan fakta, bahwa sepanjang sejarah keberlangsungan sosial pendidikan pesantren belum ditemukan sebuah kitab yang pengarangnya berasal dari kalangan perempuan. Sebuah fakta menarik terkait patriarki ditemukan oleh Van Bruineessen ketika menemukan sebuah kitab pesantren berjudul, Perukunan Jamaluddin. Kitab tersebut ditulis oleh seorang perempuan bernama Fatimah Abdul wahab Al-Byuqisi.¹⁸ Menariknya, di halaman depan kitab tersebut tidak tertulis nama asli dirinya. Melainkan telah dirubah dengan nama pamannya. Berkaitan dengan fenomena tersebut, Van Bruineessen menduga bahwa identitas penulis sesungguhnya disembunyikan dengan alasan bahwa menulis kitab adalah pekerjaan laki-laki, dan perempuan tidak ada hak di dalamnya. Itulah alasan besar dalam banyak kesempatan senantiasa ditemukan kitab di berbagai pesantren tradisional, dan banyaknya materi-materi ajaran yang kental dengan muatan-muatan bias gender. Khususnya kitab-kitab yang membahas masalah fiqh.

Tidak hanya pada masalah Pendidikan, hal ini berlanjut pada masalah pernikahan pada perempuan yang mana dalam melakukan pemilihan jodoh. Sebagai contoh perjodohan pernikahan masyarakat Dusun Jambu Monyet, Madura yang menggunakan metode dan pola yang berbeda-beda berdasarkan kepercayaan masing-masing keluarga. Terdapat tiga metode yang biasanya menjadi pola perjodohan di sana; *pertama* adalah anak dari masing-masing keluarga dijodohkan dari mereka masih di dalam kandungan maupun dari mereka masih bayi; *kedua* yaitu dijodohkan oleh orang tuanya pada saat sudah dewasa dan melalui ikatan pertalian pertunangan; dan *ketiga* adalah para anak-anak saling mencintai atau saling tertarik sendiri satu sama lain setelah dilakukan perkenalan. Hal tersebut menjadikan asas dan tata cara dari masing-masing perjodohan yang sama-sama dilakukan oleh orang tua masing-masing mempelai, dan bahkan tidak ada kaitannya dengan anaknya, sehingga yang menggerakkan adalah orang tuanya.

Perjodohan dan tata cara ini tidak lepas dari kaitan pendidikan rata-rata anak perempuan di Dusun Jambu Monyet, Madura yang dititipkan melalui pesantren salaf. Di sana mereka hanya belajar mengaji kitab-kitab klasik, bahkan biasanya jarang ikutserta pendidikan formal, sehingga rata-rata mereka hanya sekolah formal sampai pada SD dan MI, atau hanya sekolah di pondok pesantrennya saja, lalu dinikahkan. Hal ini kembali lagi pada pemikiran warga Dusun Jambu Monyet, Madura bahwa perempuan memang kodratnya hanya untuk melayani, menikah dan punya anak, serta patuh pada suami, sehingga untuk hal pendidikan dikesampingkan kecuali

¹⁸ Martin Van Bruineessen, Kitab Kuning, Pesantren dan Tarikat, (Bandung: Mizan, 1995), hlm. 177-178.

pada pendidikan agama, yang digunakan untuk bekal menikah. Inilah alasan utama perempuan jarang disekolahkan pada jenjang pendidikan yang tinggi oleh orang tuanya.¹⁹

Dari kasus inipun sangat rentan merambat sebagai kasus bias gender. Fenomena bias gender yang terjadi di Dusun Jambu Monyet, Madura seperti adanya ketimpangan perlakuan, sehingga dalam satu pihak merasa dirugikan akibat mengalami ketidakadilan. Yang dimaksud adanya bias dan ketidakadilan disini adalah bila salah satu memiliki posisi, kedudukan dan kesejahteraan yang lebih baik dari yang lain. Ketimpangan gender pada perempuan juga tampak pada kondisi perempuan yang memiliki akses pendidikan terbatas, karena dianggap hanya akan menikah saja. Namun, apabila ditelaah lebih lanjut lagi sikap kepemimpinan dan kepintaran perempuan sangat diperlukan untuk mendidik anak-anak yang nantinya akan menjadi penerus keluarga dan bangsa. Dampak negatif lainnya dari bias gender ini adalah adanya pihak-pihak yang tidak mendapat akses yang sama sehingga merasa timpang atas apa yang terjadi, yang menyebabkan hilangnya keserasian dan keharmonisan dalam hidup, seperti dalam kasus di Dusun Jambu Monyet yang menjadi kodrat dan disetujui oleh semua pihak bahwa perempuan tugasnya menjaga rumah tangga, sedangkan laki-laki bekerja. Hal ini menyebabkan terjadinya ketimpangan antar satu dengan lainnya, dengan menempatkan laki-laki menjadi posisi pemimpin yang harus dituruti. Dampak negatif ini juga sangat memengaruhi ketimpangan dalam peran rumah tangga dan keharmonisan di dalamnya, contoh; perempuan Madura yang menerima perlakuan bias atau tidak seimbang dari segi pendidikan yang diterima perempuan lebih rendah dibanding pendidikan bagi laki-laki, serta dalam hal urusan rumah tangga lebih banyak dibebankan kepada perempuan dari pada laki-laki, terutama dalam urusan domestik, yang dalam hal ini seharusnya ada pembagian yang adil diantara keduanya.

Bias gender bukan hanya pada urusan domestik atau rumah tangga saja, namun apabila dalam urusan domestik atau rumah tangga sudah terjadi ketimpangan, maka tidak diragukan masalah ini akan mengakar pada structural. Contohnya pada kepemimpinan atau sosok pemimpin di desa tersebut, yang akan susah dan berat dalam menerima pemimpin perempuan. Dan dalam banyak sector perekonomian dan bantuan-bantuan dalam usaha yang ada, banyak terjadi pengelompokan pada sektor usaha dan bantuan pada laki daripada perempuan. Dalam sektor kesekretariatan dan sector pendidikan, perempuan jarang ada yang terjun, begitu pula pada dunia politik. Hal ini dikarenakan perempuan dipandang belum terlalu bisa untuk melakukan kepemimpinan pada hal-hal yang krusial, sehingga ditetapkan mereka pada wadah-wadah yang memang telah disediakan bagi masyarakat, bolehnya perempuan hanya disini.

Dalam hal program pembangunan dan lainnya, laki-laki masih tetap menjadi penentu kebijakan, meskipun dalam banyak kasus biasanya perempuan hanya akan menerima manfaat dari suaminya, sehingga jarang dari mereka yang memiliki pendapat sendiri atau berdikari (berdiri di atas kaki sendiri) atau dalam bahasa lain disebut mandiri. Walaupun demikian, perjuangan kesetaraan gender ditujukan kepada penguatan laki-laki dan perempuan, dengan kondisi yang dialami dalam suatu masyarakatnya. Dalam isu kesetaraan gender dan keadilan dalam ketimpangan gender perempuan yang pernah dirilis oleh Harian Kompas, pada terbitan tahun 2000, bahwa adanya ketidaksetaraan gender di Indonesia sangat memprihatinkan banyak

¹⁹ Munawara, E. M. Y., & Dewi, S. I. 2015. Budaya Pernikahan Dini Terhadap Kesetaraan Gender Masyarakat Madura.

orang tua yang lebih mendahulukan untuk menyekolahkan anak laki-laknya pada tingkat yang lebih tinggi dan terjamin daripada anak perempuan. Hal ini menyebabkan tingginya angka putus sekolah bagi anak perempuan. Selain itu, adanya kesulitan ekonomi yang terjadi menyebabkan masalah pemberdayaan perempuan yang masuk dalam program pemerintah tidak banyak dilakukan, sehingga kondisi perempuan di Indonesia masih banyak yang mengalami ketimpangan Gender. Dinamika ketimpangan gender sangat memprihatinkan di Indonesia bahkan adanya ketimpangan sudah menjadi hal wajar di Indonesia. Maka, harus banyak dilakukan sosialisasi dan gerakan fundamental untuk merubah hal ini. Dimulai dari penghapusan ketimpangan dan kesetaraan gender dengan menerbitkan atau membuat aturan-aturan dan program yang lebih melibatkan perempuan di dalamnya, maupun meminta banyak keterlibatan perempuan di dalamnya agar dapat menghilangkan kesan ketimpangan gender yang terjadi. Hal ini yang nantinya akan meningkatkan keadilan pada kedua belah gender.

Teori konflik oleh Karl Marx²⁰ mulai naik ke permukaan akibat ketidakseimbangan dalam struktur ekonomi pada sistem ekonomi kapitalis. Seiring berjalannya waktu, teori konflik berkembang pada ranah sosial dan budaya. Perspektif konflik pada dasarnya melihat ketidaksetaraan sebagai hasil dari pembagian sumber daya yang kurang atau tidak merata. Poin utama yang ditekankan pada perspektif teori adalah hubungan antara ketidaksetaraan tersebut dengan pengaturan kekuasaan, serta sistem penindasan. Tercantum pada buku "*Dimensions of Human Behavior, Person and Environment*" oleh Elizabeth D. Hutchison, bahwa konflik berada di antara kelompok dominan yang mendapatkan akses sumber daya (*resources*) lebih banyak dan kelompok ter subordinasi yang tidak memiliki akses sumber daya. Ketika distribusi sumber daya lebih berat kepada suatu kelompok mayoritas, maka kelompok tersebut memiliki kekuasaan (*power*) dan keuntungan (*privilege*) berpusat terus menerus pada mereka.²¹ Akibatnya, terjadi konflik antara dua kelompok yang timbul karena ketidaksetaraan ini. Implikasi dari teori konflik akibat ketidaksetaraan ini berbentuk dominasi dan perlakuan tidak adil pada kelompok yang ter subordinasi, seperti diskriminasi dan pemanfaatan *privileges* yang dimiliki kelompok dominan.

Teori feminis melihat bahwa dalam sudut pandang konflik adanya relasi gender yang menjadi fokus utama dari ketidak setaraan gender, yang dalam hal ini dipengaruhi oleh berbagai macam faktor yang terlibat dalam banyak hal dan banyak tempat. Salah satunya feminis menyebut bahwa adanya hubungan relasi dan kekuatan serta sumber daya dari adanya dominasi laki-laki yang menyebabkan adanya ketimpangan di berbagai bidang yang akhirnya menekankan pada aspek diskriminasi pada perempuan. Akibatnya terjadi dominasi laki-laki sehingga menyebabkan adanya bias gender atau ketidak setaraan gender bagi perempuan. Penempatan sudut pandang perempuan menjadi sebuah identitas dalam konseptualisme adalah suatu bagian dan badan yang tidak bisa dipisahkan. Sehingga tergambar dan dijelaskan bahwa satu-satunya musuh perempuan adalah patriarki dalam ruang privat dan publik. Patriarki mendominasi dan membuat adanya ketimpangan untuk berbuat maupun bersikap yang oleh penganut sudut pandangan esensialisme yang menyatakan bahwa tindakan seperti pemberian

²⁰ Hutchison, E. D. (2015). *Dimensions of Human Behavior, Person and Environment* (5th ed.). SAGE Publications, Inc

²¹ Ibid.

afirmasi maupun egeliter tidak cukup dalam membentuk hukum tersebut.²² Yang selanjutnya pengalaman dan keberagaman dalam hidup menjadi salah satu hal yang dilakukan sebagai hukum karena yang berhak menjadikan hukum dalam feminis adalah perempuan sendiri dengan menciptakan hukum feminisnya.²³

Dalam hukum feminis esensialisme terdapat beberapa objek secara kritik dan netral yang berbeda dalam penerapan dan sudut pandangnya. Akomodasi hukum baru ini menawarkan adanya hermeneutika dan dekonstruksi hukum feminis untuk mengembangkan hukum baru yang dilakukan untuk mengembangkan kritik dan objektivitas netral dalam mengakomodasi hukum yang sudah ada. Menurut Carol Smart, pengalaman perempuan dalam menciptakan hukum baru adalah dari pengalaman fundamental dari dirinya sendiri, sehingga hukum baru dalam sisi feminisme berkembang. Di samping itu, adanya perubahan tidak bisa hanya dari satu sisi hermeneutika hukum, namun berada dalam dekonstruksi yang membangun ruang publik dan ruang privat bagi perempuan. Smart juga berpendapat bahwa hukum mempunyai banyak pengetahuan yang di dalamnya terdapat kuasa untuk mendiskualifikasi kebenaran-kebenaran lain. Kebenaran tersebut bersifat sebagai ilmu pengetahuan yang secara tidak langsung memiliki pengertian lain, yang mana di dalamnya hukum secara inkonsisten dapat dan memiliki penyimpangan logika non internal yang tidak bersifat doktrinitas positivisme hukum.²⁴ Hal ini menunjukkan akan perlunya rekonstruksi hukum baru yang dapat membuat perempuan mendefinisikan dirinya masing-masing, yang dapat dimasukkan dalam pengalaman personal mereka, kemudian dikontekstualisasikan dalam hukum positif yang masuk diskursus *feminist jurisprudence*. Hukum positif ini dapat meningkatkan kesadaran personal perempuan dalam pembuatan pengetahuan hukum baru.²⁵

Kontekstualisasi *feminist jurisprudence* ini merupakan pembahasan hukum positif, namun prakteknya bertentangan dengan doktrin positivisme hukum, dan sebaliknya mengarah kepada perwujudan preposisi *feminist legal theory*. Adapun dua doktrin utama positivisme hukum yakni netralitas dan objektivitas hukum, yang mana keduanya diidealkan sebagai prasyarat terwujudnya kepastian hukum. Sedangkan, ketimpangan hukum muncul karena ketimpangan jenis kelamin yang menyebabkan adanya diskursus dan bias pada gender, hal ini disebabkan juga oleh adanya aspek parsial dan pertimbangan jenis kelamin. Sebagaimana disimpulkan dalam Undang-Undang atau secara hierarki hukum, bahwa dalam pembentukan hukum feminis dijadikan konstruksi perundang-undangan, harus berdasar pada hukum dan *jurisprudence* yang berlaku. Terutama pada keberpihakan hukum dalam zona, maka keberpihakan hukum dan partisipatif hukum dapat menciptakan keamanan bagi warga masyarakat serta memberi peluang dalam aspek peningkatan kualitas hidup.

²² Hillaire A. Barnett, Introduction to ZFeminist Jurisprudence, London-Sidney, 1998, Martha Minow, "Feminist Reason : Getting it and Losing It" dalam Weisberg, D Kelly, (ed.).1993. *Feminist Legal Theory : Foundations*. Philadelphia : Temple University Press, hlm. 57-67.

²³ Patricia Cain, 1993, "Feminist Jurisprudence: Grounding the Theories" dalam Weisberg, D Kelly,(ed.). 1993. *Feminist Legal Theory: Foundations*. Philadelphia : Temple University Press, hlm. 359

²⁴ Carol Smart, 1989, *Feminism and Power of Law*.London:Routledge, hlm. 4-14; dan Carol martdalam Hillaire A. Barnett, 1998, *Op. Cit.* hlm. 81-84.

²⁵ Patricia Cain, dalam D. Kelly Weisberg, 2008, *Op. Cit.*, hlm. 244-246.

KESIMPULAN

Masyarakat Madura mayoritas tumbuh dan berkembang dengan kebudayaan patriarkinya. Perempuan masih disorot dalam pekerjaan domestik dan rumah tangga, ketimbang laki-laki yang hanya menjalankan peran pekerjaan saja. Hal ini menjadi miris, karena pekerjaan mengurus rumah yang harus dikerjakan perempuan Madura, sehingga banyak dari mereka yang mengesampingkan Pendidikan. Namun, tak jarang pula perempuan dalam rumah tangga yang masih berusaha untuk berdikari atau mandiri meskipun mereka sudah berkeluarga. Mereka berusaha mandiri dalam mengasuh anak dan mengurus rumah, tetapi mereka juga harus tetap mencari penghasilan tambahan, seperti berjualan di toko maupun membuka usaha jualan makanan sendiri. Bahkan, hal tersebut menunjukkan sisi perempuan yang memiliki peran ganda dalam rumah tangga.

Di sisi lain, untuk mengurasi kasus bias gender, perlunya diadakannya dekonstruksi hukum dan pendekatan feminisme disini. Dengan pendekatan tersebut dapat memfokuskan pendapat dari sudut pandang pengalaman perempuan, karena dalam hal ini diperlukannya hermeneutika dan dekonstruksi hukum dalam dominasi positivisme hukum yang menjamin adanya kepastian hukum. Maka, netralitas dan objektivitas hukum akan terwujud hanya bila hukum tersebut bersifat tertutup dan otonom dari berbagai perspektif moral, agama, filsafat, politik, sejarah, dan bahkan jenis kelamin.

REFERENSI

- Astuti, Tri Marhaeni P. (2011). *Konstruksi Gender dalam Realitas Sosial*. Semarang: Unnes Press.
- Bartky, S. L. (1990) *Femininity and Domination*. New York: Routledge.64
- Bourdieu Pierre. 2010. Dominasi Maskulin. Yogyakarta : Jalasutra, 110-112
- Carol Smart, 1989, *Feminism and Power of Law*.London:Routledge,
- Clark, D. P. (2010). *Molecular Biology*. New York: Academic Cell.
- Gairola, R. (2017). Burning with shame: desire and south asian patriarchy, from gayatri spivak's "can the subaltern speak?" to deepa mehta's fire. *Comparative Literature*, 54(4), 307-324
- Hidayati, Tatik. 2009. *Perempuan Madura Antara Tradisi dan Industrialisasi*. Karsa Vol XVI No. 2 Oktober 2009
- Hidayati, Tatik. 2009. *Perempuan Madura Antara Tradisi dan Industrialisasi*. Karsa Vol XVI No. 2 Oktober 2009
- Hillaire A. Barnett, Introduction to Feminist Jurisprudence,London-Sidney, 1998, Martha Minow,“Feminist Reason:Getting it and Losing It” dalamWeisberg, D Kelly, (ed.).1993. *Feminist Legal Theory:Foundations*. Philadelphia:Temple University Press,
- Hutchison, E. D. (2015). *Dimensions of Human Behavior, Person and Environment* (5th ed.). SAGE Publications, Inc
- Koesno, Moh. 1975. *Kedudukan Wanita Menurut Adat Beberapa Masyarakat Pedesaan Madura*. Surabaya: BKKBN.
- Mahfudin, A., & Waqi'ah, K. (2016). Pernikahan Dini dan Pengaruhnya terhadap Keluarga di Kabupaten Sumenep Jawa Timur. *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 1(April), 33–49.
- Martin Van Bruineessen , *Kitab Kuning, Pesantren dan Tarikat*, (Bandung: Mizan, 1995), hlm. 177-178.

- Mu'in, A., & Hefni, M. (2016). Tradisi Ngabulâ di Madura (Sebuah Upaya Membentuk Keluarga Sakinah bagi Pasangan Muda). *KARSA: Journal of Social and Islamic Culture*, 24(1), 109-125.
- Munawara, E. M. Y., & Dewi, S. I. 2015. Budaya Pernikahan Dini Terhadap Kesetaraan Gender Masyarakat Madura.
- Muzzammil, S., Affan, M., HS, M. A., & Masturiyah, M. (2021). Motif, Konstruksi, dan Keadilan Semu dalam Praktik Poligami Kiai Pesantren di Madura. *Jurnal SMART (Studi Masyarakat, Religi, Dan Tradisi)*, 7(01), 129–142.
- Nurmila, N. (2015). Pengaruh Budaya Patriarki Terhadap Pemahaman Agama dan Pembentukan Budaya. *KARSA*, 23(105), 1–16.
- Patricia Cain, 1993, "Feminist Jurisprudence: Grounding the Theories" dalam Weisberg, D Kelly, (ed.). 1993. *Feminist Legal Theory: Foundations*. Philadelphia: Temple University Press, hlm. 359
- Putri, R. A., Artaria, M. D., & Graham-Davies, S. (2018). Traditional body care of women in Madura Island. *Masyarakat, Kebudayaan Dan Politik*, 31(3), 339–349.
- Raditya, A. (2020). Karakter Orang Madura, Nasionalisme, Dan Globalisasi.
- Raditya, D., dkk. (2014). Pengaruh Modal Investasi Minimal di BNI Sekuritas, Return, dan Persepsi Terhadap Risiko Pada Minat Investasi Mahasiswa, Dengan Penghasilan Sebagai Variabel Moderasi. *E-Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana*. Volume 3. No 7.
- Rifai, Mien A. 2007. *Manusia Madura*. Yogyakarta: Pilar Media